



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL : [kominfosandi@jogjakota.go.id](mailto:kominfosandi@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

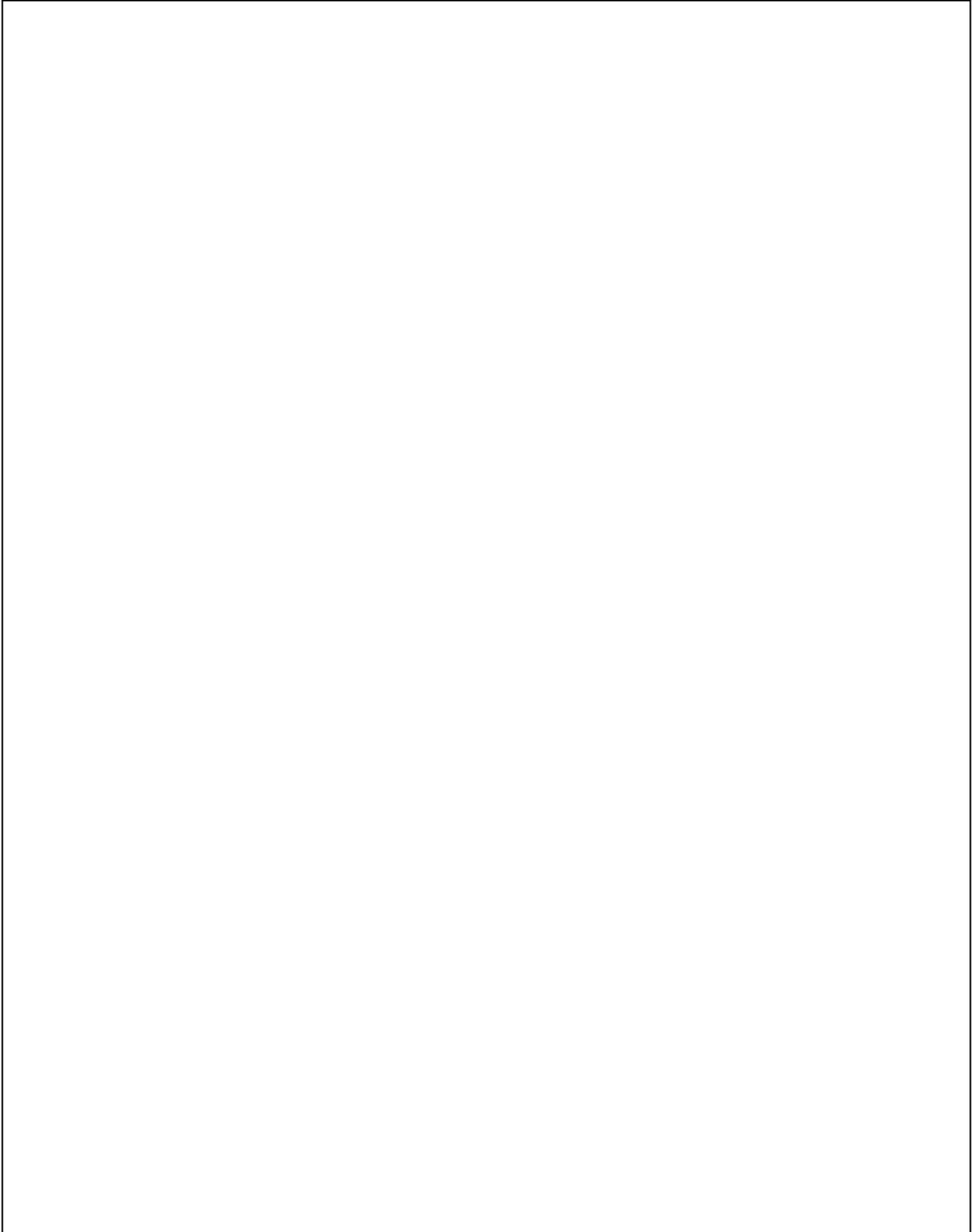
---

Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 17 September 2008

Halaman: 3



## Segera Buat Survei Tandingan Potensi Parkir

**JOGJA** - Anggapan adanya kebocoran parkir di tingkat Dinas Perhubungan ditepis Pemkot Jogja. Melalui Badan Perekonomian dan Pendapatan Daerah (P2D), pemkot segera melakukan survei tandingan atas beberapa penelitian yang pernah dilakukan pihak lain, salah satunya UGM, terkait potensi parkir.

Kepala Perekonomian dan Pendapatan Daerah (P2D) Kota Jogja Danang Soebagjono berdalih, hasil survei yang pernah dilakukan pihak lain hanyalah perhitungan kotor saja. Dia ingin menunjukkan potensi parkir secara objektif.

Menurut Danang, penelitian selama ini hanya sekadar mengalihkan jumlah kendaraan yang parkir dengan tarif yang berlaku. "Padahal tidak setiap hari kondisinya sama," ujarnya.

Berbagai tuduhan soal kebocoran parkir, lanjut Danang, tidak benar karena pemkot tidak menerima semua pembayaran parkir sesuai ketentuan yang berlaku. "Dari total pendapatan yang diterima juru parkir (jukir), pemerintah hanya mendapat 40 persen saja," katanya.

Di beberapa titik bahkan hanya menyerahkan hasil 20 persen saja. "Itu biasanya terjadi di area parkir yang masuk tanah persil," ungkapnya.

Ditambah lagi tidak semua jukir menyerahkan kewajibannya secara penuh. Karenanya, pendapatan parkir tahun 2007 sebesar Rp 1,2 miliar, menurut Danang, adalah angka yang wajar.

## Transparansi Jukir Pengaruhi PAD

### PEMKOT

Sambungan dari hal 3

Ia mengatakan sebelum disetor seringkali biaya parkir telah dipangkas jukir, sehingga uang yang masuk ke pemkot tidak begitu besar. "Jumlah jukir ada 820 orang. Mereka juga butuh hak. Kalau satu orang Rp 600 ribu, berarti dikalikan 820," katanya.

Kendala lain yang terjadi

adalah banyaknya pemilik toko yang tidak menggunakan jalan untuk parkir. Melainkan parkir di halaman pribadi. Itu juga menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya uang parkir yang masuk menjadi PAD kota. Bahkan tarif liar yang diberlakukan para jukir, pemkot juga tidak bisa berbuat banyak.

Misalnya yang terjadi di kawasan Jalan Malioboro. Kendati angka yang tertera pada karcis

parkir Rp 500, jukir akan menarik ongkos Rp 1.000. Untuk mobil bisa mencapai Rp. 3000 hingga Rp. 5000. Semakin besar kendaraan, ongkos yang ditarik juga menyesuaikan. Semuanya tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, sebagian penghasilan parkir juga ada yang masuk KPPD (Kantor Pengelolaan Pajak Daerah). "Misalnya hasil parkir di hotel ataupun mal," tuturnya.

Terpisah, Kepala Bidang Teknik Sarana Prasarana Dishub Kota Jogja Moejanto mengatakan, transparansi jukir adalah faktor penting yang akan mempengaruhi besar kecilnya PAD dari pos parkir. Kendati upaya penegakan hukum telah dilakukan, kenyataannya hal itu masih kerap terjadi. "Bisa jadi ada oknum Dishub yang ikut bermain. Jika tertangkap tangan, langsung kami tindak tegas," katanya. (yog)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pengelolaan Pasar			
3. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
4. UPT. Pengelola wil Utara			

Yogyakarta, 10 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005